

**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH OLEH DINAS
PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL KABUPATEN
KAMPAR (STUDI RUMAH BATIK SRIKANDI)**

Rizki Irnanda¹, ²Andriyus

Universitas Islam Riau

[1rizkiirnanda@student.uir.ac.id](mailto:¹rizkiirnanda@student.uir.ac.id), [2andriyus@soc.uir.ac.id](mailto:²andriyus@soc.uir.ac.id)

Abstrak

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah upaya untuk memandirikan masyarakat melalui potensi yang mereka miliki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Batik Srikandi oleh Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar. serta mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi di dalam pemberdayaan masyarakat usaha mikro kecil dalam penelitian ini menggunakan teori dari Ginanjar Kartasasmita (1997) memiliki 3 indikator yang perlu dipenuhi, Pemungkinan, penguatan, perlindungan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Informan dalam penelitian ini adalah kepala dinas perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil. Kepala bagian pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, kepala seksi pemberdayaan, pengembangan, Pemilik Usaha Rumah batik Srikandi dan pegawai Rumah batik Srikandi. Hasil dari penelitian bahwa kegiatan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah oleh dinas perdagangan koperasi dan Usaha mikro Kecil kabupaten kampar belum dilihat dari 3 indikator pemungkinan, penguatan, perlindungan belum optimal. Faktor-faktor yang menghambat dalam penelitian ini kurangnya dinas perdagangan koperasi dan usaha mikro kecil dalam memberikan perhatian, pelatihan, pembinaan, pengawasan dan perlindungan kepada pelaku Usaha Mikro kecil dan Menengah.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Batik

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah suatu usaha untuk meningkatkan serta memperbaiki seluruh aspek kehidupan masyarakat maupun bangsa dan negara yang sekaligus merupakan sebuah proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara. Pembangunan nasional mencerminkan kehendak untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata, serta dapat mengembangkan kehidupan

masyarakat yang maju, demokratis berdasarkan Pancasila.¹ Salah satu prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional ialah pembangunan dari segi ekonomi. Pembangunan ekonomi pada umumnya dapat dimaknai sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka yang panjang.²

Pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran dan tanggungjawab Pemerintah Daerah. Berdasarkan pada Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab serta peran yang sangat besar untuk mengurus urusan pemerintahannya termasuk didalamnya dalam hal pembangunan ekonomi. Salah satu kewajiban yang harus dijalankan Pemerintah Daerah dalam pembangunan ekonomi yaitu meningkatkan kualitas kehidupan. Pemerintah daerah dalam hal ini dapat memberikan dorongan kepada masyarakatnya dalam berwirausaha. Salah satunya yaitu dalam wujud sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).³

UMKM adalah sebuah pelaku usaha di Indonesia yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi dituntut untuk memberikan dorongan pembangunan ekonomi masyarakat. Pemerintah menyediakan berbagai fasilitas dan kebijakan yang bertujuan untuk mendukung operasional dan pertumbuhan usaha UMKM. Dukungan ini meliputi berbagai hal, seperti penyediaan akses keuangan yang lebih mudah, pelatihan dan pendidikan untuk pemilik usaha, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan usaha UMKM. Perkembangan UMKM ini sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pertumbuhan usaha UMKM akan menciptakan lapangan kerja baru, menggerakkan sektor-sektor terkait, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, UMKM juga berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sektor UMKM merupakan kegiatan wirausaha ekonomi yang bisa dimiliki satu orang maupun kelompok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

¹ Fadhil, M. (2024). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar (Studi Di Kecamatan Kuok). *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 125-134.

² Lestari, S. I. (2019). *Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (Umk) Oleh dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).

³ Amin, M. (2020). *Pelaksanaan Penerbitan Izin Industri Kerajinan Rotan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor: 2 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).

undangan.⁴ Adanya sektor UMKM dapat menciptakan berbagai manfaat bagi daerah diantaranya seperti dapat menghadirkan wirausahaan- wirausahaan yang baru sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan, yang pastinya hal tersebut pasti akan menyerap tenaga kerja.⁵

Dalam hal ini, dibutuhkan adanya peran pemerintah yang ditandai dengan adanya Undang-undang Nomor: 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang bertujuan antara lain untuk mewujudkan peran usaha kecil sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional. Undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan sebagai salah satu bentuk upaya penciptaan iklim usaha melalui kerjasama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Usaha Besar.⁶ Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memiliki landasan hukum berupa Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan berdasarkan dari TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) masing-masing dan PP RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang pemberdayaan dan perlindungan koperasi bahwa koperasi sebagai badan usaha yang berbasis pada sistem ekonomi kerakyatan, digerakkan secara gotong- royong berdasarkan asas kekeluargaan dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, perlu secara terus menerus diberdayakan dan dikembangkan guna membantu meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat.⁷

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar, sebagai representasi Pemerintah Daerah, memiliki peran krusial dalam mengimplementasikan program-program pemberdayaan dan pengembangan UMKM di wilayah Kabupaten Kampar.

⁴ Ganiem, L. M., Sabir, M., & Rantesalu, A. (2024). Pelatihan Komunikasi Dalam Meningkatkan Kualitas Produk Yang Dihasilkan Oleh Umkm. *Sabajaya Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(01), 21-25.

⁵ Misral, M., Ardi, H. A., Sandri, S. H., Rahmayanti, S., Rahayu, N. I., Alagusri, J., ... & Aulisma, R. (2022). Pelatihan Pengelolaan Kemasan Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kabupaten Kampar. *Abdimas Ekodiksosiora: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ekonomi, Pendidikan, Dan Sosial Humaniora (E-Issn: 2809-3917)*, 2(2), 147-152.

⁶ Zen, Z. H., Satriardi, S., Dermawan, D., Anggraini, D. A., & Yul, F. A. (2017). Pelatihan Desain Kemasan Produk Umkm Di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. *Jurnal Pengabdian Untukmu Negeri*, 1(2), 12-15.

⁷ Tiaraputri, A., Jayakusuma, Z., Hz, E. D., Lestari, M. M., Edorita, W., & Diana, L. (2019, October). Penguatan Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Yang Berbasis Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Rangka Perdagangan Bebas Asean. In *Unri Conference Series: Community Engagement* (Vol. 1, Pp. 466-469).

Anggaran APBN dan APBD dimanfaatkan untuk memfasilitasi akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, pameran produk, dan berbagai bentuk pembinaan lainnya bagi pelaku UMKM. Berbagai inisiatif dilakukan, seperti memberikan pelatihan manajemen usaha, membantu akses permodalan melalui kemitraan dengan lembaga keuangan, serta memfasilitasi keikutsertaan UMKM dalam pameran dagang baik di dalam maupun luar daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM sehingga dapat berkembang lebih kompetitif. Selain itu, Dinas juga aktif melakukan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait, seperti Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi serta asosiasi pengusaha, guna mengoptimalkan program pemberdayaan UMKM. Hal ini penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan upaya penguatan UMKM di Kabupaten Kampar.⁸

Dalam realitanya, masih terdapat berbagai macam masalah yang dihadapi sejumlah Pelaku Usaha di Kabupaten Kampar, hal tersebut seharusnya menjadi pendorong bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam memaksimalkan pemberdayaan UMKM untuk pencapaian kesejahteraan ekonomi rakyat dan kemandirian. Di Kabupaten Kampar sendiri jumlah UMKM cukup banyak dan masih perlu mendapatkan dorongan dan bimbingan, permasalahan yang timbul lainnya yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemahaman UMKM, masih rendahnya daya saing produk UMKM, masih rendahnya kualitas SDM UMKM, kurang optimalnya pengembangan UMKM di Kabupaten Kampar.⁹ Kurang optimalnya pembinaan dan pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar terhadap UMKM dan masyarakat dapat dilihat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha yang dalam hal ini juga belum optimal dilaksanakan. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan juga masyarakat secara menyeluruh, yang dilakukan secara sinergis dan berkesinambungan.

Dalam hal ini peneliti bermaksud fokus pada salah satu UMKM yang ada di

⁸ Azlina, N., Taufik, T., Putri, S. M., & Indraprasta, M. H. D. (2020, November). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Umkm Di Kabupaten Kampar. In *Unri Conference Series: Community Engagement* (Vol. 2, Pp. 66-71).

⁹ Rizki, L. S. M. (2022). *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Batu Bata Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).

Kabupaten Kampar yakni Rumah batik Srikandi yang akan dijadikan objek penelitian. Penamaan tersebut disesuaikan dengan karakter pewayangan yaitu srikandi, yang merupakan salah satu perwujudan dari perempuan berbasis kultural Jawa. Rumah batik srikandi berdiri sejak tahun 2019. Rumah batik srikandi telah menghasilkan karya yang sangat beragam. Salah satunya yang paling menarik adalah batik khas sibuk yang menjadi ikon baru bagi desa tersebut.

Produk batik yang dihasilkan oleh rumah batik di Desa Sibuk mampu mencapai target yang cukup baik. Batik tersebut dapat dipasarkan dan digunakan oleh berbagai pihak, seperti anggota dewan Kabupaten Kampar, Dharma Wanita Persatuan Pekanbaru, serta pemerintah dan masyarakat Desa Sibuk. Batik Srikandi menjadi kebanggaan desa dan juga sumber penghasilan bagi para ibu rumah tangga yang ingin mendapatkan tambahan penghasilan untuk keluarga. Usaha batik membutuhkan manajemen dan pengelolaan modal yang baik karena persaingan usaha yang kompetitif serta bahan baku yang mahal. Industri rumah tangga seperti kerajinan batik berpotensi besar untuk membantu perekonomian dan mengurangi pengangguran, terutama dengan menyerap tenaga kerja perempuan yang tidak membutuhkan persyaratan tinggi. Hal ini menunjukkan peran penting perempuan tidak hanya di sektor domestik, namun juga sebagai pekerja produktif di sektor publik.

Terdapat beberapa faktor penghambat dalam pengembangan UMKM Batik Srikandi di Desa Sibuk. Pertama, keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha, terutama akibat mahalnya bahan baku kain batik yang harus didatangkan dari Jawa. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi pendidikan, pengetahuan, maupun keterampilan, yang berdampak pada rendahnya informasi dan kreativitas. Ketiga, kurangnya minat masyarakat Desa Sibuk untuk belajar membatik, padahal batik memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Keempat, kendala dalam penggunaan teknologi, baik pada proses produksi maupun aktivitas promosi dan pemasaran. Kelima, kondisi ekonomi para pekerja wanita di rumah batik yang relatif rendah, sehingga mereka harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Selain itu, latar belakang pendidikan yang terbatas juga menyulitkan mereka untuk masuk ke sektor informal lain. Namun, para pekerja wanita ini cukup aktif dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitar.

Berdasarkan fenomena yang ada, Batik Srikandi di Desa Sibuk perlu mendapatkan perhatian dan dukungan yang lebih dari pemerintah Kabupaten Kampar. Sebagai aset daerah, Batik Srikandi memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam pengembangannya. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya dan usaha dari Pemerintah Kabupaten Kampar, khususnya Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil, untuk memberdayakan UMKM Batik Srikandi dan UMKM lainnya di wilayah tersebut. Pemberdayaan ini diharapkan dapat membantu para pelaku usaha untuk tetap berjalan dan berkembang, sehingga dapat bersaing dengan rumah batik lainnya dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk meneliti lebih lanjut mengenai upaya pemberdayaan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan studi kasus di Rumah Batik Srikandi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang mana datanya dipaparkan dengan cara deskriptif. Sesuai dengan fenomena yang di temukan dalam penelitian, maka penelitian ini akan dilakukan di Desa Sibuk Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Dalam penelitian ini Key Informan dan beserta informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu Informan kunci (*key informan*), Informan utama, dan Informan tambahan. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis adalah membuat basis data kasus dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, baik data kualitatif maupun kuantitatif. Sumber dan jenis data primer penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan subjek serta gambaran ekspresi, sikap dan pemahaman dari subjek yang di teliti sebagai dasar utama melakukan interpretasi data. Sedangkan data sekunder yaitu berasal dari buku-buku, literatur, internet, majalah, atau jurnal ilmiah, arsip, dokumentasi pribadi, dan dokumen resmi lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian ini.

Adapun tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama. Pertama, reduksi data. Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penelitian ini akan melalui tiga tahap. Pertama, tahap reduksi data, di mana peneliti akan melakukan klarifikasi dan pemilihan data yang relevan dengan

fokus penelitian, yaitu peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM Batik Srikandi di Kabupaten Kampar. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, peneliti akan merangkum masalah-masalah yang ditemukan dalam penelitian untuk kemudian disajikan secara sistematis. Pada tahap akhir, peneliti akan melakukan analisis lebih lanjut menggunakan teori-teori terkait ilmu ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM, untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (UMK) Kabupaten Kampar

Dalam penelitian ini, banyak faktor yang dapat mempengaruhi pemberdayaan masyarakat, terutama dalam memberikan pembinaan di bidang manajemen kewirausahaan. Upaya pemberdayaan yang dilakukan meliputi peningkatan kualitas produksi, peningkatan mutu kemasan, manajemen pembukuan, dan manajemen pemasaran. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Kampar, khususnya Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Kepala Bidang Pemberdayaan UMK, dan Kepala Seksi Pemberdayaan, Pengembangan, Promosi dan Peluang Usaha, memiliki wewenang untuk melaksanakan, membina, dan mengawasi kegiatan pembinaan usaha mikro kecil di Kabupaten Kampar agar dapat berjalan dengan baik.¹⁰

Setelah melakukan observasi, peneliti menemukan beragam permasalahan yang perlu mendapat pembinaan pemberdayaan usaha mikro kecil oleh Kepala Bidang Pemberdayaan UMK dan Kepala Seksi Pemberdayaan, Pengembangan, Promosi dan Peluang Usaha untuk meningkatkan kualitas pembinaan terhadap usaha mikro kecil. Oleh karena itu, diperlukan analisis pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil, Kepala Seksi Pemberdayaan, Pengembangan, Promosi dan Peluang Usaha, serta Owner Rumah Batik Srikandi, yang akan dijabarkan secara berurutan berdasarkan indikator yang ditetapkan.

¹⁰ Supriana, Y. (2021). *Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Di Kecamatan Ukui)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).

1. Pemungkinan (*Enabling*)

Berdasarkan hasil observasi memberikan Pembinaan agar pelaku UMKM dapat berkembang secara optimal, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK harus mampu memberikan pembinaan kepada seluruh pelaku UMKM agar pelaku UMKM lainnya tidak merasakan kerugian dalam memberikan pembinaan. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas kegiatan pembinaan yang dinilai dari pemungkinan (*enabling*) dapat disimpulkan “kurang baik”. Dalam suatu program, apabila proses pelaksana telah terlaksana tentu diharapkan adanya hasil atau manfaat yang diperoleh sesuai dengan harapan atau tidak.¹¹

2. Penguatan (*Empowering*)

Berdasarkan hasil observasi dalam memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM untuk dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK harus mampu memberikan pelatihan sesuai jenis usahanya masing-masing sehingga pelaku UMKM tidak merasakan Kerugian dari pelatihan yang diberikan. Dapat disimpulkan dilihat dari indikator penguatan (*empowering*) yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah yang dilakukan oleh pihak Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK masih ditemukan bahwa kurangnya pengetahuan dan pelatihan yang diberikan pada pelaku usaha sehingga masih ada jenis usaha lainnya yang tidak mendapatkan pelatihan sesuai dengan porsinya sehingga masih dikatakan “kurang baik” karena belum terlaksana dengan baik. Setelah adanya pemahaman dan pengetahuan yang diberikan kepada pelaku UMKM, tentu akan ada akibat yang ditimbulkan baik itu positif atau negative dari setiap program pembinaan yang dilakukan dari poses penguatan (*empowering*).¹²

3. Perlindungan (*Protecting*)

Berdasarkan hasil observasi, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK harus memberikan pengawasan yang lebih baik kepada pelaku UMKM, terutama dalam mempromosikan produk ke luar daerah. Hal ini dikarenakan hasil penjualan yang kurang memuaskan akibat kurangnya pengawasan dan promosi ke daerah lain. Selanjutnya, terkait indikator perlindungan (*protecting*), pelaksanaan tugas kegiatan pembinaan dapat dinilai "cukup baik" namun belum terlaksana dengan optimal. Setelah adanya

¹¹ Wardi, J., & Putri, G. E. (2020). Pentingnya Penerapan Pengelolaan Keuangan Bagi Umkm. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*.

¹² Yetti, Y., Felandy, D., & Maiyori, C. (2022). Pelaksanaan Ketentuan Izin Usaha Bagi Perusahaan Kecil Dan Menengah Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Hukum Respublica*, 22(1).

perlindungan yang diberikan kepada pelaku UMKM, seperti menghilangkan bentuk diskriminasi yang dialami oleh masyarakat yang lemah, masih perlu ditingkatkan agar tidak tertindas oleh masyarakat yang kuat. Secara keseluruhan, pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kampar sudah berjalan cukup baik. Namun, jika dilihat dari masing-masing sub indikator, masih terdapat beberapa aspek yang belum terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK perlu memperbaiki kualitas maupun kuantitas dari kegiatan pemberdayaan tersebut.¹³

Faktor-Faktor penghambat Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar

Dari analisis yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa hambatan dalam Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar, antara lain yaitu :

1. Terbatasnya jumlah modal merupakan kendala utama dalam pengembangan usaha UMKM di Kabupaten Kampar. Mayoritas pengusaha menggunakan modal sendiri dalam menjalankan usahanya. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.¹⁴
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi
3. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang

¹³ Murnawati, M., Erti, L., & Tasril, T. (2019). Analisis Pendapatan Dan Kelayakan Finansial Usaha Jelli Kelapa Pada Umkm Dekla Di Desa Salo Bangkinang Kabupaten Kampar. *Jurnal Daya Saing*, 5(1), 60-64.

¹⁴ Firdaus, E., Firdaus, F., Firmanda, H., Kurnia, D., & Andrikasmi, S. (2020, November). Penerapan Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Lopek Bugih Melalui Perlindungan Hukum Dan Inovasi Usaha Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Riau. In *Unri Conference Series: Community Engagement* (Vol. 2, Pp. 10-15).

mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. aru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

4. Terbatasnya Akses Pasar Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.¹⁵

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis serta pembahasan yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat usaha mikro kecil (UMK) di Kabupaten Kampar secara keseluruhan sudah cukup baik. Untuk indikator pemungkinan (*enabling*), tanggapan dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK serta pengelola UMK menunjukkan hasil yang cukup baik dan sudah berjalan cukup lancar, meskipun masih perlu ditingkatkan lagi. Pada indikator penguatan (*empowering*), tanggapan dari masyarakat pelaku UMK juga termasuk dalam kategori cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan telah memberikan pengetahuan, pemahaman, dan pelatihan yang dibutuhkan masyarakat, meskipun belum sepenuhnya optimal. Sementara itu, untuk indikator perlindungan (*protecting*), tanggapan dari pelaku UMK juga termasuk cukup baik. Kegiatan pemberdayaan yang diberikan sudah cukup baik dari sebelumnya, namun bentuk perlindungan yang diberikan belum begitu baik dan perlu dioptimalkan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. (2020). *Pelaksanaan Penerbitan Izin Industri Kerajinan Rotan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor: 2 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).
- Azlina, N., Taufik, T., Putri, S. M., & Indrapraja, M. H. D. (2020, November). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Umkm Di Kabupaten Kampar. In *Unri Conference Series: Community Engagement* (Vol. 2, Pp. 66-71).
- Fadhil, M. (2024). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar (Studi Di Kecamatan Kuok). *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 125-134.

¹⁵ Purwanto, H., Sunanto, S., Hudi, I., Nurhaini, S., & Pramesti, D. A. (2023). Lppm Umri Memberikan Stimulus Umkm Melalui Pkm Pada Usaha Kerupuk Maju Jaya Untuk Mendukung Upaya Mengetaskan Stunting Dari Produk Ikan Lele. *Jurnal Pengabdian Untukmu Negeri*, 7(2), 295-302.

- Firdaus, E., Firdaus, F., Firmanda, H., Kurnia, D., & Andrikasmi, S. (2020, November). Penerapan Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Lopek Bugih Melalui Perlindungan Hukum Dan Inovasi Usaha Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Riau. In *Unri Conference Series: Community Engagement* (Vol. 2, Pp. 10-15).
- Ganiem, L. M., Sabir, M., & Rantesalu, A. (2024). Pelatihan Komunikasi Dalam Meningkatkan Kualitas Produk Yang Dihasilkan Oleh Umkm. *Sabajaya Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(01), 21-25.
- Lestari, S. I. (2019). *Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (Umk) Olehdinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).
- Misral, M., Ardi, H. A., Sandri, S. H., Rahmayanti, S., Rahayu, N. I., Aligusri, J., ... & Aulisma, R. (2022). Pelatihan Pengelolaan Kemasan Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kabupaten Kampar. *Abdimas Ekodiksosiora: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ekonomi, Pendidikan, Dan Sosial Humaniora (E-Issn: 2809-3917)*, 2(2), 147-152.
- Murnawati, M., Erti, L., & Tasril, T. (2019). Analisis Pendapatan Dan Kelayakan Finansial Usaha Jelli Kelapa Pada Umkm Dekla Di Desa Salo Bangkinang Kabupaten Kampar. *Jurnal Daya Saing*, 5(1), 60-64.
- Purwanto, H., Sunanto, S., Hudi, I., Nurhaini, S., & Pramesti, D. A. (2023). Lppm Umri Memberikan Stimulus Umkm Melalui Pkm Pada Usaha Kerupuk Maju Jaya Untuk Mendukung Upaya Mengetaskan Stunting Dari Produk Ikan Lele. *Jurnal Pengabdian Untukmu Negeri*, 7(2), 295-302.
- Rizki, L. S. M. (2022). *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Batu Bata Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).
- Supriana, Y. (2021). *Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Di Kecamatan Ukui)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).
- Tiaraputri, A., Jayakusuma, Z., Hz, E. D., Lestari, M. M., Edorita, W., & Diana, L. (2019, October). Penguatan Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Yang Berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Rangka Perdagangan Bebas Asean. In *Unri Conference Series: Community Engagement* (Vol. 1, Pp. 466-469).
- Wardi, J., & Putri, G. E. (2020). Pentingnya Penerapan Pengelolaan Keuangan Bagi Umkm. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*.
- Yetti, Y., Felandy, D., & Maiyori, C. (2022). Pelaksanaan Ketentuan Izin Usaha Bagi Perusahaan Kecil Dan Menengah Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Hukum Respublica*, 22(1).
- Zen, Z. H., Satriardi, S., Dermawan, D., Anggraini, D. A., & Yul, F. A. (2017). Pelatihan Desain Kemasan Produk Umkm Di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. *Jurnal Pengabdian Untukmu Negeri*, 1(2), 12-15.